

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah pertama pada penelitian ini, maka penulis mencoba untuk memaparkan mengenai perkembangan setiap variabel selama periode 2017 hingga 2023. Adapun variabel yang akan dipaparkan perkembangannya yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan.

5.1.1 Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu dari banyaknya alat ukur yang digunakan dalam menilai kondisi perekonomian di suatu wilayah pada periode tertentu. Perkembangan PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jambi umumnya mencerminkan pertumbuhan perekonomian Provinsi Jambi dari waktu ke waktu. PDRB atas dasar harga berlaku memperlihatkan total nilai tambah dari barang ataupun jasa yang dihitung didasarkan pada harga yang berlaku pada tahun berjalan. Melalui indikator ini, dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi ekonomi suatu wilayah sekaligus mengamati perubahan dan pergeseran struktur ekonominya. Secara garis besar, peningkatan nilai PDRB mengindikasikan adanya perkembangan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Sebaliknya, jika pertumbuhan PDRB menurun, hal itu dapat menjadi tanda adanya hambatan atau perlambatan dalam proses pembangunan ekonomi daerah.

Berikut perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2017-2023, sebagaimana terlihat pada tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2017-2023 (Persen)

Wilayah	Tahun							rata-rata
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Kerinci	8.875,71	9.408,04	9.912,47	10.460,27	11.237,96	12.225,62	13.405,35	10.789,35
Perkembangan (%)	-	6,00	5,36	5,53	7,73	8,78	9,65	7,18
Merangin	13.518,64	14.452,75	15.288,07	15.670,88	17.837,35	20.283,84	22.524,53	17.082,29
Perkembangan (%)	-	6,91	5,36	2,50	13,82	13,72	11,05	8,89
Sarolangun	13.451,75	14.502,49	15.126,92	14.429,42	16.558,99	20.772,44	21.508,73	16.621,53
Perkembangan (%)	-	7,81	4,31	-4,61	14,76	25,45	3,54	8,54
Batang Hari	14.695,34	15.663,92	16.463,29	16.392,80	18.809,26	24.304,29	25.448,61	18.825,36
Perkembangan (%)	-	6,59	5,10	-0,43	14,74	29,21	4,71	9,99
Muaro Jambi	21.334,80	22.960,99	24.294,99	24.382,39	27.558,34	32.959,04	35.891,04	27.054,51
Perkembangan (%)	-	7,62	5,81	0,36	13,03	19,60	8,89	9,22
Tanjab Timur	21.044,14	24.111,74	24.680,30	19.563,27	21.783,66	25.606,19	25.072,61	23.123,13
Perkembangan (%)	-	14,58	2,36	-20,73	11,35	17,55	-2,08	3,84
Tanjab Barat	35.670,94	41.541,07	42.945,46	37.133,85	42.080,58	50.081,47	50.852,27	42.900,81
Perkembangan (%)	-	16,46	3,38	-13,53	13,32	19,01	1,54	6,70
Tebo	12.981,95	13.839,07	14.593,44	14.737,98	16.949,29	19.698,15	21.183,50	16.283,34
Perkembangan (%)	-	6,69	4,45	0,99	15,00	16,22	7,54	8,48
Bungo	16.022,89	17.303,26	17.895,94	17.305,75	20.082,89	24.897,23	26.234,77	19.963,25
Perkembangan (%)	-	7,99	3,43	-3,30	16,05	23,97	5,37	8,92
Kota Jambi	26.293,31	28.797,41	30.636,93	29.465,15	31.918,63	36.183,84	40.580,62	31.982,27
Perkembangan (%)	-	9,52	6,39	-3,82	8,33	13,36	12,15	7,66
Kota Sungai Penuh	6.371,29	6.951,10	7.481,79	7.562,25	7.980,86	8.680,47	9.477,38	7.786,45
Perkembangan (%)	-	9,1	7,63	1,08	5,54	8,77	9,18	6,88
Rata-Rata	-	9,02	4,87	-3,27	12,15	17,79	6,50	7,84

Sumber: BPS Provinsi Jambi 2024, Diolah

Berdasarkan Tabel 5.1 rata-rata perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku di 11 Kabupaten/Kota Provinsi Jambi sepanjang periode 2017–2023 tercatat sebesar 7,84 persen. Perkembangan PDRB tertinggi di 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi periode 2017–2023 terjadi di tahun 2022 yaitu sebesar 17,79 persen, sedangkan perkembangan PDRB terendah di 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi periode 2017–2023 terjadi di tahun 2020 dengan angka sebesar - 3,27 persen.

Kabupaten Batanghari mencatat rata-rata perkembangan PDRB tertinggi di 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sepanjang periode 2017–2023 yaitu sebesar 9,99 persen. Hal ini karena pesatnya perkembangan aktivitas di sektor pertambangan dan perkebunan, khususnya kelapa sawit dan batu bara, yang merupakan sektor unggulan daerah ini. Selain itu, letaknya yang strategis dan relatif dekat dengan pusat distribusi di Jambi turut mempercepat pertumbuhan

investasinya. Sedangkan jika dilihat daerah dengan rata-rata jumlah PDRB tertinggi di 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sepanjang periode 2017–2023 yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu sebesar Rp 42.900,81 miliar. Hal ini karena daerah ini didominasi oleh sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, yang menjadi andalan perekonomian pada daerah ini. Luasnya lahan perkebunan kelapa sawit baik milik rakyat maupun perusahaan swasta besar memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB, tidak hanya dari sisi produksi tetapi juga dari sisi pengolahan hasil perkebunan yang mendorong pertumbuhan industri pengolahan (industri CPO dan turunannya). Selain itu, Tanjung Jabung Barat juga memiliki akses langsung ke wilayah pesisir dan pelabuhan seperti Pelabuhan Roro Kuala Tungkal yang mempermudah distribusi hasil produksi ke luar daerah maupun luar negeri. Kondisi ini menciptakan konektivitas yang mendukung pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa transportasi. Jika dilihat dari kedua daerah ini yaitu sama-sama mengalami peningkatan PDRB setiap tahunnya, tetapi di tahun 2020 Kabupaten Batanghari mengalami penurunan PDRB yang sedikit yaitu sebesar -0,43, sedangkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami penurunan PDRB yang cukup besar yaitu -13,53. Hal ini terjadi karena dampak signifikan dari pandemi COVID-19 yang melanda secara nasional, termasuk di daerah tersebut. Pandemi menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi di berbagai sektor terutama pada sektor perkebunan yang menjadi sektor utama di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu kelapa sawit dan industri pengolahannya yang selama ini menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatat rata-rata perkembangan PDRB terendah di 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sepanjang periode 2017–2023 dengan rata-rata perkembangan sebesar 3,84 persen. Perekonomian daerah ini tergolong rendah dikarenakan pada wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur didominasi oleh lahan gambut yang menyebabkan produksi di sektor pertanian dan perkebunan tidak bisa diandalkan di wilayah ini. Adapun sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan yang cenderung memiliki pertumbuhan lambat, bersifat musiman, serta rentan terhadap perubahan cuaca, bencana alam, dan fluktuasi

harga komoditas. Tanjung Jabung Timur belum memiliki sektor unggulan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi secara konsisten. Selain itu, infrastruktur wilayah yang belum merata dan aksesibilitas yang masih terbatas turut menghambat mobilitas barang dan jasa sehingga aktivitas ekonomi berjalan kurang optimal. Adapun pada sektor sekunder yang mana menyebabkan perusahaan-perusahaan tidak memiliki ketertarikan untuk berinvestasi di wilayah ini. Adapun yang menyebabkan perkembangan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur terendah yaitu terjadi penurunan yang sangat besar di tahun 2020 yaitu sebesar -20,73 persen. Ini terjadi karena dampak dari COVID-19 yang menyebabkan aktivitas perikanan dan pertanian yang menjadi tumpuan masyarakat sempat terhenti akibat pembatasan sosial dan terganggunya jalur distribusi ke pasar lokal maupun antar daerah. Harga hasil pertanian dan perikanan menurun drastis karena permintaan pasar yang melemah, sehingga pendapatan masyarakat pun ikut merosot.

Jika dilihat daerah yang memiliki jumlah PDRB terendah periode tahun 2017-2023 di 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yaitu Kota Sungai Penuh sebesar Rp 7.786,45 miliar. Struktur ekonomi daerah yang didominasi oleh sektor-sektor dengan nilai tambah rendah dapat menjadi penyebabnya. Sebagai kota kecil yang terletak di wilayah pegunungan dengan luas wilayah yang relatif sempit, Kota Sungai Penuh tidak memiliki potensi sumber daya alam dalam skala besar seperti pertambangan atau perkebunan industri yang menjadi penopang utama perekonomian seperti di kabupaten lain. Perekonomian kota ini lebih banyak bergantung pada sektor perdagangan lokal, jasa, dan pertanian skala kecil yang hasil produksinya lebih ditujukan untuk konsumsi lokal, bukan untuk pasar ekspor atau industri besar. Selain itu, investasi swasta di sektor industri maupun infrastruktur juga cenderung rendah karena terbatasnya akses transportasi dan konektivitas wilayah ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lainnya. Jika dilihat dari kedua daerah ini yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami perkembangan yang cukup signifikan dan besar di setiap tahunnya, tetapi juga mengalami penurunan yang cukup besar di tahun 2020 yang disebabkan oleh COVID-19 yang melanda daerah secara nasional yang menyebabkan

perekonomian menurun. Kemudian dibandingkan dengan Kota Sungai Penuh yang mengalami peningkatan perkembangan PDRB setiap tahunnya, tetapi mengalami perkembangan yang sedikit.

5.1.2 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian dari sumber penerimaan yang diperoleh sebuah daerah yang berperan penting pada proses pembangunan daerah yang mana PAD ini dihasilkan melalui sumber-sumber pendapatan daerah yang kemudian pengelolaannya dilakukan secara langsung oleh pemerintah daerah setempat yang proses pemungutannya didasarkan pada peraturan daerah yang telah disesuaikan dengan ketentuan hukum yang diberlakukan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri ditetapkan menjadi peran penting pada hal pembiayaan daerah itu sendiri, yang mana kemampuan dalam menjalankan pembangunan dilihat dari seberapa besar kontribusi PAD yang diberikan kepada APBD.

Tabel 5.2 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2017-2021 (Persen)

Wilayah	Tahun							rata-rata
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Kerinci	85,761	80,481	85,924	81,666	66,894	44,374	57,330	71,776
Perkembangan (%)	-	-6,16	6,76	-4,96	-18,09	-33,67	29,20	-4,49
Merangin	86,693	89,286	106,161	100,370	107,880	116,713	113,206	102,901
Perkembangan (%)	-	2,99	18,90	-5,46	7,48	8,19	-3,00	4,85
Sarolangun	85,185	118,829	94,621	70,099	63,589	70,486	75,413	82,603
Perkembangan (%)	-	39,50	-20,37	-25,92	-9,29	10,85	6,99	0,29
Batang Hari	87,927	98,809	91,567	104,231	148,436	108,119	138,826	111,131
Perkembangan (%)	-	12,38	-7,33	13,83	42,41	-27,16	28,4	10,42
Muaro Jambi	77,927	90,305	93,795	84,264	110,745	108,275	127,451	98,966
Perkembangan (%)	-	15,89	3,86	-10,16	31,43	-2,23	17,71	9,42
Tanjab Timur	76,776	49,607	54,370	52,244	53,899	59,775	57,230	57,700
Perkembangan (%)	-	-35,39	9,60	-3,91	3,17	10,92	-4,25	-3,31
Tanjab Barat	98,779	147,940	121,680	115,557	118,526	130,480	129,917	123,268
Perkembangan (%)	-	49,77	17,75	-5,03	2,57	10,08	-0,43	12,45
Tebo	68,406	76,160	83,236	78,459	77,818	86,174	91,771	80,289
Perkembangan (%)	-	11,34	9,29	-5,74	-0,82	10,74	6,49	5,22
Bungo	183,134	133,848	140,327	126,133	198,745	140,736	165,884	155,544
Perkembangan (%)	-	-26,91	4,84	-10,12	57,57	-29,19	17,87	2,34
Kota Jambi	397,295	338,892	393,430	355,675	384,008	437,026	448,465	393,542
Perkembangan (%)	-	-14,70	16,09	-9,50	7,97	13,81	2,62	2,72
Kota Sungai Penuh	31,533	34,184	34,957	28,366	59,113	69,262	69,635	46,721
Perkembangan (%)	-	8,41	2,26	-18,86	18,40	17,17	0,54	4,65
Rata-Rata	-	5,19	5,60	-7,80	12,98	-0,95	-2,88	4,05

Sumber: BPS Provinsi Jambi 2024, Diolah

Berdasarkan tabel 5.2 rata-rata perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi pada periode tahun 2017-2023 sebesar 4,05 persen. Kemudian rata-rata perkembangan PAD tertinggi pada 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi terjadi di tahun 2021 yakni sebesar 12,98 persen. Sedangkan untuk rata-rata perkembangan PAD terendah pada 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yaitu terjadi di tahun 2023 sebesar -2,88 persen. Untuk daerah yang mempunyai rata-rata perkembangan PAD tertinggi terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yakni sebesar 12,45 persen. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya sektor perkebunan dan industri pengolahan kelapa sawit. Sektor ini tidak hanya memberikan kontribusi besar terhadap PDRB, tetapi juga menjadi sumber utama penerimaan daerah melalui pajak daerah, retribusi, serta kontribusi dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan izin usaha perkebunan. Selain itu, daerah ini memiliki pelabuhan dan jalur distribusi yang mendukung aktivitas perdagangan yang turut meningkatkan potensi penerimaan dari sektor jasa dan transportasi.

Daerah yang memiliki rata-rata jumlah PAD tertinggi yaitu Kota Jambi sebesar Rp 393.541.364,61 miliar. Hal ini karena posisinya sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan perdagangan provinsi. Sebagai kota terbesar dan termaju di Provinsi Jambi, Kota Jambi memiliki tingkat urbanisasi dan aktivitas ekonomi yang tinggi dengan didominasi oleh sektor perdagangan, jasa, perhotelan, restoran, dan transportasi. Kondisi ini menciptakan basis pajak daerah yang luas, seperti pajak restoran, hotel, hiburan, parkir, dan reklame, serta retribusi pelayanan publik lainnya. Selain itu, banyak perusahaan besar dan kantor regional yang berkedudukan di Kota Jambi turut menyumbang pendapatan melalui izin usaha dan kontribusi perizinan. Pemerintah Kota Jambi juga dikenal aktif dalam menggali potensi PAD melalui peningkatan pelayanan publik dan penerapan sistem digitalisasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika dilihat dari kedua daerah tersebut yaitu sama-sama mengalami kenaikan dan penurunan PAD periode tahun 2017-2023. Jika dibandingkan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk perkembangan PAD mengalami perkembangan yang cukup besar, sedangkan Kota Jambi mengalami perkembangan yang tidak cukup besar

meskipun secara jumlah Kota Jambi yang paling besar penerimaan PAD di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Daerah dengan rata-rata perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terendah terdapat di Kabupaten Kerinci yaitu sebesar -4,49 persen. Hal ini disebabkan keterbatasan struktur ekonomi dan potensi fiskal daerah yang relatif sempit. Kabupaten Kerinci memiliki karakteristik wilayah pegunungan dan sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian tradisional, terutama tanaman hortikultura dan perkebunan rakyat yang memiliki nilai tambah ekonomi dan kontribusi pajak yang rendah. Meskipun Kerinci dikenal sebagai daerah penghasil komoditas unggulan seperti kayu manis dan teh, sebagian besar hasil produksinya tidak dikelola oleh industri lokal dalam skala besar sehingga tidak memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan PAD. Selain itu, sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata di Kerinci belum berkembang secara maksimal, meskipun memiliki potensi besar seperti keberadaan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan Danau Kerinci. Minimnya infrastruktur pendukung dan investasi di sektor pariwisata menyebabkan sektor ini belum mampu memberikan kontribusi optimal terhadap PAD. Dari sisi administratif, kapasitas pemungutan pajak dan retribusi daerah juga masih terbatas karena lemahnya basis objek pajak, rendahnya kesadaran wajib pajak, serta belum optimalnya digitalisasi sistem pendapatan.

Jika dilihat dari daerah dengan rata-rata jumlah PAD terendah terdapat di Kota Sungai Penuh, yaitu sebesar 46.721.376,86 miliar. Hal ini disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi yang terbatas. Sebagai kota kecil yang berada di wilayah pegunungan dan dikelilingi oleh Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh memiliki luas wilayah yang sempit dan keterbatasan dalam sumber daya alam, sehingga kegiatan ekonomi yang berkembang sebagian besar hanya berasal dari sektor perdagangan kecil, jasa lokal, dan pertanian skala rumah tangga. Infrastruktur ekonomi yang belum berkembang secara optimal serta minimnya investasi swasta yang masuk ke daerah ini turut memperkecil peluang peningkatan PAD. Jika dibandingkan kedua daerah tersebut, Kabupaten Kerinci mengalami penurunan yang cukup besar pada perkembangan PAD periode tahun 2017-2023 yang

menyebabkan Kabupaten Kerinci mencatat rata-rata perkembangan PAD terendah. Namun jika dilihat dari jumlah maka Kabupaten Kerinci lebih unggul dibandingkan dengan Kota Sungai Penuh yang mencatat rata-rata jumlah PAD terendah.

5.1.3 Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Dana perimbangan menjadi satu dari banyaknya bagian dari instrumen kebijakan fiskal yang dirancang guna mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah dan memperkuat kapasitas keuangan pemerintah daerah. Dana perimbangan diharapkan tidak hanya menjadi instrumen pemerataan fiskal, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas layanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Tabel 5.3 Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2017-2023 (Persen)

Wilayah	Tahun							rata-rata
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Kerinci	799,918	802,841	1.142,121	1.069,285	1.085,058	1.104,805	1.128,353	1.018,912
Perkembangan (%)	-	0,37	42,26	-6,38	1,48	0,18	2,13	6,67
Merangin	979,514	978,237	1.039,700	959,888	936,632	951,729	999,928	977,947
Perkembangan (%)	-	-0,13	6,28	-7,68	-2,42	1,61	5,06	0,45
Sarolangun	768,388	848,082	972,213	1.035,576	1.032,228	1.126,082	1.132,644	987,888
Perkembangan (%)	-	10,37	14,64	6,52	-0,32	9,09	0,58	6,81
Batang Hari	926,871	888,246	963,265	849,188	976,395	946,130	1.074,256	946,336
Perkembangan (%)	-	-4,17	8,45	-11,84	14,98	-3,10	13,54	2,98
Muaro Jambi	958,352	978,668	1.042,396	953,765	1.151,338	1.154,121	1.239,151	1.068,256
Perkembangan (%)	-	2,12	6,51	-8,50	20,72	0,24	7,37	4,74
Tanjab Timur	896,259	905,488	967,523	833,566	863,126	927,143	931,614	903,531
Perkembangan (%)	-	1,03	6,85	-13,85	3,55	7,42	0,48	0,91
Tanjab Barat	1.037,376	1.096,230	1.306,127	1.059,213	1.375,004	1.534,306	1.360,640	1.252,699
Perkembangan (%)	-	5,67	19,15	-18,90	29,81	11,59	-11,32	6,00
Tebo	780,757	806,444	842,320	756,064	748,172	879,362	905,508	816,947
Perkembangan (%)	-	3,29	4,45	-10,24	-1,04	17,53	2,97	2,83
Bungo	909,063	917,465	961,104	1.083,781	1.056,038	1.119,665	1.085,817	1.018,990
Perkembangan (%)	-	0,92	4,76	12,76	-2,56	6,03	-3,02	3,15
Kota Jambi	1.013,006	1.110,715	1.110,177	1.036,459	1.070,421	1.083,897	1.050,095	1.067,824
Perkembangan (%)	-	9,65	-0,05	-6,64	3,28	1,26	-3,12	0,73
Kota Sungai Penuh	561,310	571,604	608,668	575,414	554,302	591,309	569,922	576,076
Perkembangan (%)	-	1,83	6,48	-5,46	-3,67	6,68	-3,62	0,37
Rata-Rata	-	2,81	10,89	-6,38	5,80	5,32	1,00	3,24

Sumber: BPS Provinsi Jambi 2024, Diolah

Berdasarkan Tabel 5.3 rata-rata perkembangan Dana Perimbangan di 11 Kabupaten/Kota Provinsi Jambi tahun 2017–2023 sebesar 3,24 persen. Rata-rata perkembangan Dana Perimbangan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 10,89

persen, sementara untuk rata-rata perkembangan Dana Perimbangan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar -6,38 persen.

Kabupaten Sarolangun mencatat rata-rata perkembangan tertinggi sebesar 6,81 persen. Sarolangun merupakan salah satu kabupaten dengan luas wilayah yang besar dan potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor pertambangan dan kehutanan. Meskipun sektor-sektor ini menghasilkan kontribusi besar terhadap PDRB, sebagian besar pengelolaan sumber dayanya dilakukan oleh pemerintah pusat atau pihak swasta nasional, sehingga kontribusi langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif kecil. Dalam konteks ini, pemerintah pusat memberikan kompensasi melalui dana perimbangan, terutama Dana Bagi Hasil (DBH) yang berasal dari penerimaan negara atas sektor sumber daya alam seperti hasil pertambangan batu bara dan kehutanan yang cukup dominan di Sarolangun. Selain Dana Bagi Hasil (DBH), Kabupaten Sarolangun juga mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam jumlah besar, seiring dengan masih rendahnya kapasitas fiskal daerah dan tingginya kebutuhan pembiayaan pembangunan, terutama untuk infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan. Jumlah penduduk yang cukup besar serta tingkat kemiskinan yang masih menjadi perhatian turut menjadi dasar dalam perhitungan alokasi Dana Perimbangan dari pusat.

Daerah dengan rata-rata jumlah Dana Perimbangan tertinggi yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar Rp 1.252.699.358,40 miliar. Hal ini karena wilayah ini memiliki karakteristik sosial ekonomi yang membutuhkan dukungan fiskal tinggi dari pemerintah pusat, terutama untuk mendorong pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik. Secara geografis, Tanjung Jabung Barat memiliki wilayah yang luas dengan sebagian besar terdiri dari daerah pesisir dan pedalaman yang memerlukan biaya tinggi untuk pembangunan jaringan transportasi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur penunjang ekonomi. Pemerintah pusat menyalurkan dana perimbangan dalam jumlah besar, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membantu pembiayaan operasional pemerintahan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk proyek-proyek pembangunan prioritas. Selain itu, Tanjung Jabung Barat juga menerima Dana

Bagi Hasil (DBH), terutama dari sektor perkebunan dan sumber daya alam lainnya. Jika membandingkan Kabupaten Sarolangun dengan rata-rata perkembangan tertinggi dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan rata-rata jumlah tertinggi maka dapat dilihat bahwa keduanya mengalami kenaikan dan penurunan Dana Perimbangan, pada Kabupaten Sarolangun terjadi penurunan yang sedikit di tahun 2021, sedangkan pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat terjadi penurunan yang besar pada tahun 2020 kemudian menurun lagi di tahun 2023.

Daerah dengan rata-rata perkembangan Dana Perimbangan terendah yaitu Kota Sungai Penuh sebesar 0,37 persen. Kota Sungai Penuh juga mencatat sebagai rata-rata jumlah Dana Perimbangan terendah sebesar Rp 576.075.491,04 miliar. Sebagai kota dengan luas wilayah yang relatif kecil dan jumlah penduduk yang tidak sebesar kabupaten lain, kebutuhan fiskal Kota Sungai Penuh dinilai lebih rendah dalam perhitungan alokasi Dana Perimbangan dari pemerintah pusat. Selain itu, tingkat pembangunan di kota ini secara umum lebih terkonsentrasi pada sektor jasa, perdagangan lokal, dan pemerintahan, dengan tingkat kebutuhan belanja infrastruktur dan pelayanan dasar yang tidak sebesar daerah dengan wilayah pedalaman atau terpencil. Dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), parameter seperti luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan tingkat kesenjangan antarwilayah menjadi indikator penting dan pada sebagian besar indikator tersebut Kota Sungai Penuh cenderung memiliki nilai lebih rendah dibandingkan daerah lain yang lebih luas dan tertinggal. Di sisi lain, kota ini juga tidak memiliki potensi besar di sektor sumber daya alam seperti pertambangan atau perkebunan yang dapat menghasilkan Dana Bagi Hasil (DBH) dalam jumlah besar. Akibatnya, transfer Dana Perimbangan dari pemerintah pusat lebih kecil karena kapasitas fiskal Kota Sungai Penuh dianggap relatif cukup untuk membiayai kebutuhan dasarnya.

5.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Untuk melihat pengaruh variabel bebas (Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan) terhadap variabel terikat (Produk Domestik Regional Bruto) berdasarkan regresi data panel maka dilakukan dengan beberapa pengujian berikut yaitu:

1. Uji Chow

Dalam menetapkan model mana yang paling terbaik antara *Common Effect Model* (CEM) beserta *Fixed Effect Model* (FEM). Menurut regresi data panel diperoleh hasil uji chow dengan menggunakan *evIEWS 12* diantaranya :

Tabel 5. 4 Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	41.809855	(10,64)	0.0000
Cross-section Chi-square	155.483442	10	0.0000

Sumber: *EvIEWS 12 (data diolah), 2025*

Berdasarkan uji chow tersebut menunjukkan bahwa diperoleh nilai probability yaitu $0,0000 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya model FEM lebih baik dibanding model CEM. Maka model yang dipilih adalah model *Fixed Effect Model* (FEM).

2. Uji Hausman

Dilakukan pengujian ini yaitu untuk menentukan model mana yang terbaik antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Menurut regresi data panel diperoleh hasil uji hausman melalui *evIEWS 12* sebagai berikut:

Tabel 5. 5 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq.d.f.	Prob.
Cross-section random	3.878221	2	0.1438

Sumber: *EvIEWS 12 (data diolah), 2025*

Berdasarkan uji hausman tersebut memperlihatkan bahwasanya diperoleh nilai probability yaitu $0.1438 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwasanya model FEM lebih baik dibanding model REM. Maka model yang dipilih ialah model *Random Effect Model* (REM).

3. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Dilakukan pengujian ini yaitu untuk menentukan model mana yang terbaik antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Random Effect Model* (REM). Melalui regresi data panel didapatkan hasil Uji Lagrange Multiplier melalui *evIEWS 12* antara lain:

Tabel 5. 6 Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM)

	Cross-section	Test Hypothesis Time	Both
Breusch-Pagan	144.2646 (0.0000)	0.859264 (0.3539)	145.1239 (0.0000)

Sumber: *EvIEWS 12 (data diolah), 2025*

Melalui uji Lagrange Multiplier tersebut memperlihatkan bahwasanya diperoleh nilai probabilitas yakni $0.0000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwasanya model CEM tidak lebih baik daripada model REM. Maka model yang dipilih adalah model *Random Effect Model* (REM).

5.2.1 Hasil Pengujian Estimasi Metode *Random Effect Model* (REM)

Melalui pengujian regresi data panel dapat disimpulkan bahwasanya metode regresi terbaik pada penelitian ini adalah menggunakan metode *Random Effect Model* (REM) dan diperoleh hasil regresi berikut:

Tabel 5. 7 Hasil Regresi Metode *Random Effect Model* (REM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-10215.20	3716.902	-2.748309	0.0075
PAD	6.25E-05	1.24E-05	5.025242	0.0000
DP	2.46E-05	2.98E-06	8.256121	0.0000

Sumber: *EvIEWS 12 (data diolah), 2025*

Berdasarkan hasil perhitungan dengan pendekatan *Random Effect Model* (REM) diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$PDRB_{it} = -10215,20 + 6,25E-05PAD_{it} + 2,46E-05DP_{it} + e_{it}$$

$$\text{Prob} = (0.0075) \quad (0.0000) \quad (0.0000)$$

Dari hasil perhitungan statistik dihasilkan bahwa nilai konstanta dari persamaan tersebut adalah -10215,20 yang mana artinya jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (DP) tidak berubah maka PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi akan menurun sebesar -10215,20 rupiah.

1. Nilai koefisien PAD sebesar 6,25E-05. Hal ini diartikan apabila PAD meningkat 1 miliar rupiah maka PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi meningkat sebesar 6,25 rupiah.
2. Nilai koefisien DP sebesar 2,46E-05. Hal ini diartikan apabila Dana Perimbangan meningkat 1 miliar rupiah, maka PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi akan meningkat sebesar 2,46 rupiah.

Berdasarkan hasil estimasi dengan menggunakan metode *Random Effect Model* (REM) maka dapat dijelaskan bahwasanya masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi memiliki nilai intersep yang berbeda-beda. Adapun nilai intersep sebagai berikut:

Tabel 5.8 Hasil Nilai Intersep Masing-Masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Variable	Coefficient
KERINCI--C	-8405.590
MERANGIN--C	-3159.049
SAROLANGUN--C	-2607.656
BATANGHARI--C	-1192.920
MUAROJAMBI--C	4669.867
TANJUNGPINANG--C	7319.901
TANJUNGPINANG--C	14252.20
TEBO--C	1327.199
BUNGO--C	-4550.159
KOTAJAMBI--C	-8525.490
KOTASUNGAIPENUH--C	871.7002

Sumber: Eviews 12 (data diolah), 2025

Berdasarkan hasil regresi dengan metode *Random Effect Model* (REM) maka diperoleh nilai intersep masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebagai berikut:

1. Kabupaten Kerinci

$$\text{PDRBKerinci}_{it} = -18.620,79 + 6.25\text{E-}05\text{PAD}_{it} + 2.46\text{E-}05\text{DP}_{it} + e_{it}$$

Jika terjadi perubahan PAD dan Dana Perimbangan baik antar wilayah ataupun antar waktu, maka Kabupaten Kerinci berpengaruh secara individual terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebesar -18.620,79 rupiah.

2. Kabupaten Merangin

$$\text{PDRBMerangin}_{it} = -13.374,249 + 6.25\text{E-}05\text{PAD}_{it} + 2.46\text{E-}05\text{DP}_{it} + e_{it}$$

Jika terjadi perubahan PAD dan Dana Perimbangan baik antar wilayah ataupun antar waktu, maka kabupaten Merangin berpengaruh individual terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebesar -13.374,249 rupiah.

3. Kabupaten Sarolangun

$$\text{PDRBSarolangun}_{it} = -12.822,856 + 6.25\text{E-}05\text{PAD}_{it} + 2.46\text{E-}05\text{DP}_{it} + e_{it}$$

Bila terjadi perubahan PAD dan Dana Perimbangan baik antar wilayah ataupun antar waktu, maka kabupaten Sarolangun berpengaruh individual terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebesar -12.822,856 rupiah.

4. Kabupaten Batang Hari

$$\text{PDRBBatangHari}_{it} = -11.408,12 + 6.25\text{E-}05\text{PAD}_{it} + 2.46\text{E-}05\text{DP}_{it} + e_{it}$$

Jika terjadi perubahan PAD dan Dana Perimbangan baik antar wilayah ataupun antar waktu, maka kabupaten Batang Hari mendapat pengaruh individual terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebesar -11.408,12 rupiah.

5. Kabupaten Muaro Jambi

$$\text{PDRBMuaroJambi}_{it} = -5.545,333 + 6.25\text{E-}05\text{PAD}_{it} + 2.46\text{E-}05\text{DP}_{it} + e_{it}$$

Apabila terdapat perubahan dalam PAD dan Dana Perimbangan, baik antar wilayah ataupun dari waktu ke waktu, maka Kabupaten Muaro Jambi mendapatkan pengaruh individual terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebesar -5.545,333 rupiah.

6. Kabupaten Tanjung Jabung Timur

$$\text{PDRBTanjabtj}_{it} = -2.895,299 + 6.25\text{E-}05\text{PAD}_{it} + 2.46\text{E-}05\text{DP}_{it} + e_{it}$$

Jika terjadi perubahan PAD dan Dana Perimbangan baik antar wilayah ataupun antar waktu, maka kabupaten Tanjung Jabung Timur terpengaruh secara individual terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebesar -2.895,299 rupiah.

7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat

$$PDRBTanjabbar_{it} = 4.037 + 6.25E-05PAD_{it} + 2.46E-05DP_{it} + e_{it}$$

Jika terjadi perubahan PAD dan Dana Perimbangan baik antar wilayah ataupun antar waktu, maka kabupaten Tanjung Jabung Barat mendapat pengaruh individual terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebesar 4.037 rupiah.

8. Kabupaten Tebo

$$PDRBTebo_{it} = -8.888,001 + 6.25E-05PAD_{it} + 2.46E-05DP_{it} + e_{it}$$

Jika terjadi perubahan PAD dan Dana Perimbangan baik antar wilayah ataupun antar waktu, maka kabupaten Tebo mendapat pengaruh individual terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebesar -8.888,001 rupiah.

9. Kabupaten Bungo

$$PDRBBungo_{it} = -14.765,359 + 6.25E-05PAD_{it} + 2.46E-05DP_{it} + e_{it}$$

Jika terjadi perubahan PAD dan Dana Perimbangan baik antar wilayah ataupun antar waktu, maka kabupaten Bungo terpengaruh individual terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebesar -14.765,359 rupiah.

10. Kota Jambi

$$PDRBKotaJambi_{it} = -18.740,69 + 6.25E-05PAD_{it} + 2.46E-05DP_{it} + e_{it}$$

Jika terjadi perubahan PAD dan Dana Perimbangan baik antar wilayah ataupun antar waktu, maka Kota Jambi terpengaruh secara individual terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebesar -18.740,69 rupiah.

11. Kota Sungai Penuh

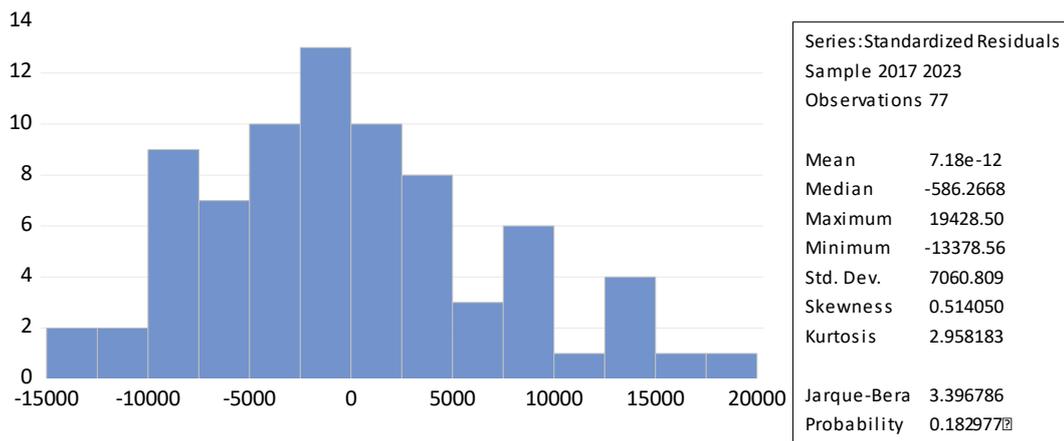
$$PDRBSungaiPenuh_{it} = -9.343,4998 + 6.25E-05PAD_{it} + 2.46E-05DP_{it} + e_{it}$$

Jika terjadi perubahan PAD dan Dana Perimbangan baik antar wilayah ataupun antar waktu, maka Kota Sungai Penuh mendapat pengaruh individual terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebesar -9.343,4998 rupiah.

5.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk menguji apakah data yang sudah dikumpulkan terdistribusi normal atau tidak. Berdasarkan uji normalitas pada penelitian ini diperoleh hasil berikut:



Sumber: Eviews 12 (data diolah), 2025

Gambar 2 Hasil Uji Normalitas

Dari gambar tersebut dapat dilihat hasil output Uji Normalitas bahwasanya nilai probability sebesar $0.182977 > 0,05$ yang berarti data terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bermaksud guna mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel bebas yang digunakan dalam model regresi. Menurut uji multikolinearitas pada penelitian ini diperoleh hasil berikut:

Tabel 5. 9 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	PAD	DP
PAD	1.000000	0.335748
DP	0.335748	1.000000

Sumber: Eviews 12 (data diolah), 2025

Melalui hasil output tersebut dapat dilihat bahwasanya nilai koefisien X1 beserta X2 sebesar $0.335748 < 0,85$. maka dapat disimpulkan bahwasanya model tidak mempunyai masalah multikolinearitas atau terbebas dari multikolinearitas.

5.2.3 Pengujian Parameter Regresi

1. Uji F

Uji F dilakukan untuk melihat apakah terdapat pengaruh variabel PAD dan Dana Perimbangan terhadap variabel PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi secara secara simultan atau bersama-sama. Uji F dilakukan dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ (0,05).

Tabel 5.10 Hasil Uji F-Statistik Pada Metode REM

F-Statistic	Prob (F-Statistic)
49.29348	0.000000

Sumber: Eviews 12 (data diolah), 2025

Berdasarkan tabel 5.10 maka dapat diketahui bahwasanya nilai F-hitung sebesar 49.29348 dengan nilai probabilitas $0,000000 < \alpha = 5\%$ (0,05), dengan membandingkan nilai F-hitung dengan nilai F-tabel maka nilai F-hitung sebesar $49.29348 > F\text{-tabel}$ sebesar 3,12. Maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya variabel PAD dan Dana Perimbangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

2. Uji t

Untuk menguji signifikan pengaruh PAD dan Dana Perimbangan (DP) terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi secara parsial maka dipilih Uji t statistik. Digunakannya Uji t yaitu untuk melihat besaran kontribusi setiap variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ (0,05). Berdasarkan output Eviews 12 maka diperoleh hasil berikut:

Tabel 5. 11 Nilai t-Statistik pada Metode Random Effect Model (REM)

Variabel	Coefficient	t Hitung	t Tabel	Prob.	keterangan
PAD	6.25E-05	5.025242	1,99254	0.0000	signifikan
DP	2.46E-05	8.256121	1,99254	0.0000	signifikan

Sumber: Eviews 12 (data diolah), 2025

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 5.11 maka untuk melihat secara rinci hasil setiap variabel secara parsial dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai t-hitung sebesar 5.025242 > t-tabel yaitu sebesar 1,99254 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ (0,05). Maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal tersebut berarti variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Dengan koefisien PAD sebesar 6.25E-05, artinya jika terjadi kenaikan PAD sebesar 1 miliar rupiah maka akan meningkatkan PDRB sebesar 6,25 rupiah.

2. Dana Perimbangan (DP)

Variabel Dana Perimbangan (DP) mempunyai nilai t-hitung senilai 8.256121 > t-tabel yaitu sebesar 1,99254 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ (0,05). Maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menandakan bahwasanya variabel Dana Perimbangan (DP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Dengan koefisien sebesar Dana Perimbangan sebesar 2.46E-05, artinya jika terjadi kenaikan Dana Perimbangan sebesar 1 miliar rupiah maka akan meningkatkan PDRB sebesar 2,46 rupiah.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) adalah uji yang dilakukan untuk melihat besaran kontribusi dari variabel – variabel independen yang digunakan terhadap variabel dependen dengan rentang nilai yaitu 0 - 1. Berdasarkan output Eviews 12 maka diperoleh hasil berikut:

Tabel 5. 12 Nilai Koefisien Determinan (R^2) pada Metode REM

R-Squared	Adjusted R-squared
0.571231	0.559642

Sumber: Eviews 12 (data diolah), 2025

Berdasarkan hasil estimasi model *Random Effect Model* (REM), maka diperoleh nilai R-squared sebesar 0.571231. Nilai Koefisien Determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari variabel Pendapatan

Asli Daerah dan Dana Perimbangan belum mampu untuk menjelaskan variabel Dependen yaitu variabel PDRB. Hal ini berarti terdapat faktor lain selain Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang mempengaruhi PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

5.3 Pengaruh Ekonomi

Berdasarkan olahan data yang telah dilakukan sebelumnya, maka diperoleh hasil estimasi melalui *Random Effect Model* (REM) untuk menganalisis pengaruh PAD beserta Dana Perimbangan terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2017-2023. Berikut merupakan hasil interpretasi dan pembahasannya:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Penelitian ini memperlihatkan bahwasanya PAD berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan melalui PDRB. PAD mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam menggali serta mengoptimalkan potensi daerah yang menjadi sumber utama pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan suatu daerah. PAD merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah yang berasal dari aktivitas ekonomi lokal, seperti pajak daerah, retribusi, hasil usaha milik daerah, dan sumber sah lainnya. Ketika aktivitas ekonomi suatu daerah meningkat, maka potensi penerimaan PAD juga akan meningkat karena terjadi peningkatan konsumsi, transaksi, dan investasi. Kemudian tingginya PAD memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan mendukung sektor-sektor produktif. Belanja pembangunan ini secara langsung akan mendorong peningkatan nilai tambah barang dan jasa yang tercermin dalam kenaikan PDRB. Semakin tinggi PAD maka semakin besar kemandirian fiskal daerah yang memungkinkan perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan dapat meminimalisir ketergantungan terhadap dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Temuan dalam penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sukma Nia, 2023) yang meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah

dan Dana Perimbangan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Sulawesi Selatan, yang mana temuan penelitiannya menunjukkan bahwasanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdampak positif serta signifikan terhadap PDRB. Lalu didukung juga dengan penelitian yang dijalankan oleh (Anwar, 2023) yang meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Kalimantan Utara, yang mana temuannya menyatakan bahwa secara baik parsial maupun secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Kalimantan Utara.

2. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dana Perimbangan adalah dana transfer dari pemerintah pusat yang diberikan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. Apabila Dana Perimbangan digunakan secara efisien maka semakin tinggi PDRB yang dicapai oleh suatu daerah. Melalui pengelolaan yang baik maka Dana Perimbangan mampu dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mampu menciptakan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan. Hal ini bisa saja terjadi karena Dana Perimbangan digunakan secara efisien untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Melalui dana perimbangan, daerah memperoleh sumber pendanaan yang relatif stabil dan cukup besar untuk membiayai belanja pemerintah daerah, termasuk pengadaan infrastruktur, layanan publik, dan kegiatan ekonomi produktif. Peningkatan belanja ini akan mendorong aktivitas ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, serta merangsang pertumbuhan sektor-sektor strategis seperti pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Dampak langsung dari meningkatnya belanja daerah yang dibiayai oleh dana perimbangan adalah peningkatan output dan nilai tambah barang dan jasa yang selanjutnya tercermin dalam kenaikan PDRB.

Temuan pada penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Kamar, 2014) yang mana meneliti tentang Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Provinsi Banten, adapun hasil temuannya menyatakan bahwasanya baik secara simultan ataupun parsial variabel Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Penelitian ini didukung juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Anwar 2023 yang meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Kalimantan Utara. Adapun hasil dalam penelitiannya memperlihatkan bahwasanya baik secara parsial maupun simultan, PAD dan Dana Alokasi Umum berdampak positif signifikan terhadap PDRB di Provinsi Kalimantan Utara.

3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Sumber-sumber pendapatan daerah berbentuk PAD dan Dana Perimbangan dapat meningkatkan laju perekonomian yang dicerminkan melalui PDRB dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ketika PAD dan Dana Perimbangan dikelola secara efektif, keduanya akan meningkatkan kapasitas belanja daerah, memperluas akses terhadap layanan dasar, meningkatkan produktivitas sektor-sektor strategis, dan menciptakan lapangan kerja. Seluruh aktivitas tersebut berkontribusi pada peningkatan output ekonomi dan nilai tambah barang dan jasa yang tercermin dalam PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Hal tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh (Kamar, 2014) yang meneliti tentang Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Banten yang mana hasil penelitiannya menemukan bahwasanya baik dengan simultan ataupun parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara PAD dan Dana Perimbangan terhadap PDRB. Dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nursafitri, 2015), yang mana penelitiannya tentang Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan temuan penelitian yaitu bahwasanya variabel independen yaitu PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara keseluruhan atau

simultan berdampak pada variabel dependen yakni PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

5.4 Implikasi Kebijakan

berdasarkan hasil penelitian bahwasanya jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan mengalami peningkatan maka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga akan mengalami kenaikan. Indikator pertumbuhan ekonomi tercermin melalui PDRB, yang mana jika PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan pada PDRB maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Perkembangan perekonomian nantinya akan jauh lebih optimal apabila benar-benar didorong oleh perencanaan yang matang serta pelaksanaan yang baik dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia (terutama sektor perikanan, kehutanan, pertanian, pertambangan serta penggalian, juga sektor perdagangan besar serta eceran). Namun dikarenakan struktur perekonomian pada saat ini masih didominasi oleh sektor pertanian, maka nilai tambah yang dihasilkan dari komoditas masih tergolong rendah. Untuk itu, diperlukan perubahan struktur ekonomi menuju sektor agroindustri beserta industri hilir lainnya agar mampu memberikan nilai tambah yang lebih tinggi.

Peningkatan PAD dan Dana Perimbangan harus diimbangi dengan kapasitas pemerintah daerah pada pengelolaan sumber daya yang ada di daerah tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah perlu mengidentifikasi serta mengembangkan potensi ekonomi lokal, misalnya sektor pariwisata, pertanian, juga industri kreatif untuk meningkatkan PAD. Implementasi sistem digital dalam pemungutan pajak beserta retribusi daerah mampu menambah efisiensi serta transparansi, juga mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi aparatur pengelola keuangan daerah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD. Ketika PAD mengalami peningkatan, pemerintah daerah mempunyai sumber daya yang lebih besar untuk mengembangkan infrastruktur, mendorong investasi, beserta menambah kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan beserta kesehatan. Di samping hal tersebut tingginya PAD juga

menunjukkan adanya potensi ekonomi daerah yang sehat, baik dari pajak maupun retribusi, atau dari hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Dana Perimbangan yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) wajib dikelola dengan lebih efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Pemerintah daerah perlu menyusun rencana penggunaan dana perimbangan secara lebih strategis dan berorientasi terhadap hasil dengan fokus kepada efektivitas dan efisiensi belanja publik yang berdampak langsung terhadap peningkatan aktivitas ekonomi regional. Dana Perimbangan juga dimanfaatkan untuk mendorong pemerataan pembangunan pada daerah-daerah yang secara fiskal lemah, sehingga dapat memperoleh dana tambahan untuk mengimbangi ketertinggalan pembangunan dari daerah lain. Dengan demikian kesenjangan antarwilayah dapat diperkecil. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa alokasi Dana Perimbangan digunakan untuk program pembangunan yang produktif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat juga perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi penggunaan dana perimbangan agar sesuai dengan tujuannya yaitu untuk memperkecil ketimpangan fiskal antar daerah serta meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam jangka panjang. Pengalokasian Dana Perimbangan supaya lebih efektif dan efisien dapat dilakukan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pasar, serta fasilitas pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.